

ANALISIS KOLABORASI PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGATASI SAMPAH DI OBJEK PARIWISATA

Bella Dian Nusantara¹, Teguh², Tri Yuniningsi³

Universitas Diponegoro^{1,2,3}
sriekowati@umb.ac.id³

ABSTRAK

Upaya Pemerintah Daerah Kota Bengkulu dalam mengatasi sampah cukup baik dengan menerbitkan berbagai peraturan daerah dan peraturan walikota, namun di lapangan sampah masih menumpuk di sana sini, ini yang melatarbelakangi penelitian karena sampah tidak dikelola dengan baik di objek pariwisata pantai Jakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimanakah kolaborasi pemerintah daerah kota Bengkulu dalam mengatasi sampah di objek pariwisata. Metode penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan studi kasus yang berfokus pada seperti apa kolaborasi pemerintah daerah kota Bengkulu dalam mengatasi persampahan di objek pariwisata Pantai Jakat. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan diskusi dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Daerah Kota Bengkulu, pelaku usaha mikro yang beraktivitas di objek pariwisata Pantai Jakat. Ada 6 informan yang berasal dari 3 stakeholder yakni pelaku usaha mikro, masyarakat dan pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi yang dilakukan oleh Pemerintah kota Bengkulu dalam mengatasi sampah belum optimal, terkonfirmasi Pemerintah Daerah kota Bengkulu

Kata Kunci: Kebijakan Persampahan, Kolaborasi, Lingkungan, Objek Pariwisata

ABSTRACT

The efforts of the Bengkulu City Regional Government in dealing with waste have been quite good by issuing various regional regulations and mayoral regulations, but in the field trash still piles up here and there, this is the background to the research because waste is not managed properly at the Jakat beach tourism object. This study aims to analyze how the collaboration of the Bengkulu city government in dealing with waste in tourism objects. This research method was carried out using a qualitative approach with case studies that focused on what kind of collaboration the Bengkulu city government had in dealing with waste at the Jakat Beach tourism object. Data was collected through in-depth interviews and discussions with the Bengkulu City Regional Government's State Civil Apparatus (ASN), micro-entrepreneurs who are active in the Jakat Beach tourism object. There were 6 informants who came from 3 stakeholders, namely micro entrepreneurs, communities and local government. The results of the study show that the collaboration carried out by the Bengkulu city government in dealing with waste has not been optimal, it has been confirmed that the Bengkulu City Regional Government

Keywords: Garbage Policy, Collaboration, Environment, Tourism Objects

PENDAHULUAN

Sampah merupakan permasalahan yang krusial bagi semua Negara, terutama Negara berkembang dengan jumlah penduduk yang banyak. Semua Negara memiliki cara dan teknik sendiri dalam mengatasi sampah yang dihasilkan penduduknya. Dibutuhkan manajemen dan sumber daya yang mumpuni untuk mengatasi pengelolaan sampah di kota (López et al., 2018). (Ming, Bui, Tseng, Lim, & Tan, 2020). Di Indonesia sampah menjadi problema di setiap daerah, temu sharing antara Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) menjelaskan bahwa Indonesia menghasilkan sampah sebanyak 68,5 ton/pertahun, tahun 2022 terjadi kenaikan sebanyak 70 ton, terdapat 24% sampah tersebut tidak dikelola dengan baik (Anonim, 2022b). Data lain juga menunjukkan bahwa 34,83% sampah tidak terkelola dengan baik pertahun (Anonim, 2022a). Data ini menunjukkan bahwa adasebagian sampah yang belum terkelola dengan baik.

Beberapa kajian terkait sampah yang tidak dikelola dengan baik akan berdampak dengan lingkungan, kesehatan dan sosial masyarakat di sekitar objek wisata (Hupponen, Havukainen, & Horttanainen, 2023; Incekara, 2022). Kajian dalam negeri juga membahas dampak sampah tidak dikelola dengan baik telah banyak dilakukan oleh para peneliti. Sampah yang dibiarkan akan mencemari lingkungan, dan berdampak tidak baik pada sosial dan kesehatan masyarakat yang berada di sekitar sampah (Hasibuan, 2016; Mahyudin, 2017). Seiring waktu dan pembangunan berkelanjutan maka proses pengelolaan sampah semakin berkembang dan menyesuaikan dengan perubahan iklim (Hupponen et al., 2023).

Untuk mengatasi pengelolaan sampah diperlukan kolaborasi dengan berbagai stakeholder terkait. Kajian terkait kolaborasi dapat menyelesaikan proyek pengelolaan sampah dengan baik dilakukan oleh (Dayana, 2021). Agar optimalnya pengelolaan sampah dilakukan kolaborasi antara bank sampah dan masyarakat (Gunanti, Permana, & Gama, 2021). Pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan baik apabila dilakukan dengan manajemen sector Triple Helix yakni sector public (pemerintah), swasta dan Perguruan Tinggi dapat melakukan dengan kolaborasi (Anuardo, Espuny, Carolina, & Costa, 2022). Artinya, dengan melakukankolaborasi dengan berbagai stakeholder maka segala problema dapat meringankan beban serta dapat mencapai tujuan organisasi (Carmela, Brunetta, Bimbo, & Kostoula, 2021; Jäger & Piscicelli, 2021; McAfee, Reinhold, Alleway, & Connell, 2021; Morse & Stephens, 2012; Muhyi & Chan, 2017; Rosyadi, Kusuma, Fitrah, Haryanto, & Adawiyah, 2020; Van Hoof & Thiell, 2014; Yuniningsi, Darmi, & Sulandari, 2019).

Kebijakan untuk mengatasi permasalahan sampah pemerintah sudah melakukan berbagai upaya, diantaranya sudah membuat regulasi. Pemerintah Pusat telah menerbitkan Undang – Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif, terpadu mulai dari ulu sampai hilir telah terbit Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan sampah pada Bank Sampah. Provinsi Bengkulu telah menerbitkan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 19 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Provinsi Bengkulu dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga. Sedangkan pemerintah kota Bengkulu telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan sampah.

Komitmen Pemerintah Daerah kota Bengkulu untuk mengatasi sampah diperkuat dengan telah terbit Peraturan (Perwal) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Persampahan, lalu untuk optimalnya pengelolaan sampah maka Walikota telah membuat Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Kota Bengkulu dalam Pengelolaan Sampah. Regulasi ini terbitkan dalam rangka agar pengelolaan sampah dapat dilaksanakan secara baik mulai dari pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pengurangan sampah sesuai dengan peraturan di atas menegaskan bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan cara pembatasan timbunan sampah,pendauran ulang sampah dan pemanfaatan kembali. Sementara untuk menanganansampah dilakukan dengan cara pemilahan, pengumpulan, pengangkutan,pengolahan dan pemerosesan akhir. Peraturan ini berlaku untuk semua kawasan.Termasuk kawasan objek wisata. Kota Bengkulu merupakan daerah pesisir,memiliki potensi objek pariwisata pantai. Potensi objek wisata pantai di kotaBengkulu kisaran 14 titik wilayah, salah satu wilayah yang banyak dikunjungi oleh wisatawan adalah Pantai Jakat.

Pantai Jakat kota Bengkulu memiliki struktur pasir yang putih bersih, landai, menjadi tujuan masyarakat untuk mandi dan bersenang – senang sembari menunggu matahari terbenam. Pantai Jakat menjadi tujuan wisata masyarakat Bengkulu khususnya, lokasi Pantai Jakat hanya hanya berjaka 1 km dari pusat kota.Masyarakat yang beraktivitas di sekitar Pantai Jakat dapat menghasilkan sampah, misalnya pelaku usaha mikro dan pengunjung wisata.

Fenomena di lapangan menunjukkan bahwa sampah di objek pariwisata Pantai Jakat belum di kelola dengan baik, terlihat sampah dibeberapa lokasi masih menumpuk. Hal ini, terkonfirmasi dengan berbagai berita di media diantaranya medcom.id memberi judul kurang perhatian, pantai jakat bengkulu dipenuhi sampah (Ansyori, 2014). Penumpukan sampah di objek wisata Pantai Jakat juga diberitakan oleh Antara inews.id yang diberi judul pantai jakat Bengkulu tercemar sampah rumah tangga (Pranoto, 2021). Daerah pesisir pantai sangat identic dengan daerah pariwisata maka diperlukan partisipasi pemangku kepentingan agar membangun objek wisata dapat melindungi lingkungan secara berkelanjutan (Minget al., 2020).

Berdasarkan uraian fenomena di atas, upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah kota Bengkulu untuk mengatasi sampah di objek wisata Pantai Jakat belum optimal. Oleh sebab itu, pemerintah daerah kota Bengkulu penting melakukan kolaborasi dari berbagai stakeholder. Pihak – pihak yang terkait yakni mereka yang beraktivitas di wilayah pantai Jakat diantaranya, pelaku usaha mikro masyarakat sebagai pengunjung wisata. Kajian ini membahas terkait bagaimana kolaborasi Pemerintah Daerah kota Bengkulu Untuk Mengatasi sampah di Objek Wisata Pantai Jakat.

METODE PENELITIAN

Kajian ini membahas dan menganalisis tentang bagaimana kolaborasi Pemerintah Daerah dalam mengatasi sampah di objek wisata Pantai Jakat. Dengan mempelajari dan mengidentifikasi sumber sampah yang ada di lokasi objek penelitian, lalu mengidentifikasi apakah pemerintah daerah telah melakukan kolaborasi dalam mengatasi sampah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang menggambarkan secara natural, dengan kondisi factual terkait kolaborasi pemerintah daerah dalam mengatasi sampah di objek wisata PantaiJakat. Penelitian ini bersifat studi kasus yang mengamati perilaku stakeholder yakni pemerintah daerah kota Bengkulu sebagai katalisator sekaligus pelaksana kebijakan, pelaku usaha mikro yang bejualan di objek wisata pantai jakat dan masyarakat pengujung.

Informan sebanyak 6 orang, karakteristik informan terdiri 3 unsur, yakni 1) unsur Pemerintah daerah Aparatur Sipil Negara (ASN) 2 orang; 2) 2 orang dari pelaku usaha mikro; 3) 2 orang pengunjung wisata. Teknik penentuan informan dengan cara purposive sampling, ASN yang memiliki pemahaman terkait pengurangan sampah dan penanganan sampah, pelaku usaha mikro adalah mereka yang telah berwira usaha selama 10 tahun ke atas, sedangkan pengunjung wisata bersifat situasional, pengunjung yang jadi informan adalah pengunjung yang bertemu pada saat penelitian dilakukan. Sumber data penelitian berasal dari data primer yakni, observasi dan wawancara mendalam. Selain itu data sekunder yang bersumber dari penelitian terdahulu, media cetak maupun online, media sosial, laporan-laporan serta peraturan – peraturan. Data dianalisis melalui kondensasi data, reduksi data, display data dan verifikasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

Pemerintah Provinsi dan kota Bengkulu juga telah menerbitkan peraturan-peraturan sebagai instrument dalam pengelolaan sampah (sudah terurai pada bagian pendahuluan). Untuk optimalnya pengelolaan sampah ini maka penting melakukan berbagai strategi dan penguatan berupa kolaborasi sebagai upaya dalam mengatasi masalah sampah. Kajian terkait pentingnya kolaborasi dalam memantapkan tugas bersama dan mencapai visi misi (Darmi, Mujtahid, & Rosidin, 2021). Oleh sebab itu tidak diragukan lagi kolaborasi dalam pengelolaan sampah penting dilakukan untuk optimalnya pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang telah diterbitkan.

PEMBAHASAN

Eksisting objek wisata Pantai Jakat

Pantai Jakat merupakan tujuan wisata unggulan masyarakat provinsi Bengkulu, hal ini disebabkan letak geografisnya yang mudah diakses, jarak antara pusat kota dan Pantai Jakat kisaran 1 km. Pantai Jakat memiliki pesona yang indah, pasir yang putih, memiliki struktur pantai yang landai, sehingga banyak masyarakat yang berwisata melakukan aktivitas bermain pasir/air, mandi, main jet ski, banana boat, pelampung yang terbuat dari ban. Dipercantik oleh suasana pantai indah yang langsung menghadap samudera hindia sambil menikmati mata hari terbenam, masyarakat dapat bersukaria sambil berfoto menikmati kuliner yang disiapkan oleh pelaku usaha mikro.



Gambar 1 . Suasana masyarakat yang sedang bersukaria di pantai jakat

Sumber : mildaini.com & medcom.id

Wilayah pantai terdapat masalah sampah yang sampai hari ini belum mampu dituntaskan. Sampah masih menumpuk di sana sini dan masih menjadi sumber masalah lingkungan pada objek wisata Pantai Jakat dengan kondisi sampah



Gambar 2. Sampah di pantai jakat yang mengganggu pemandangan

Sampah-sampah ini sebagian bersumber dari laut, terdiri dari ranting, plastic, limbah rumah tangga dan sebagainya masih menumpuk di depan warung tempat kami jualan. Tidak ada tenaga kebersihan yang menangani secara khusus, misalnya mengangkut sampah setiap hari. Dulu pernah pemerintah kota setiap jumat bersih-bersih pantai, namun 1 tahun belakangan ini tidak ada lagi (Wr, 42 tahun). Dari pernyataan informan di atas mendapatkan informasi bahwa saat ini tidak ada program ataupun pihak lain yang berkolaborasi dalam hal penanganan sampah di Pantai Jakat. Hal ini berdampak pada sampah tidak dapat teratasi dengan baik.

Analisis Kolaborasi Pemerintah Kota Bengkulu dalam Mengatasi Sampah

Sampah merupakan permasalahan krusial bagi semua Negara, saban hari manusia memproduksi sampah, hal ini dipicu bertambahnya aktivitas manusia dan bertambahnya jumlah penduduk, dengan demikian volume sampah juga semakin meningkat. Pemerintah telah berupaya untuk menuntaskan masalah sampah dengan membuat beberapa peraturan. Peraturan tertinggi adalah UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Untuk melaksanakan UU ini maka pemerintah daerah harus menerbitkan peraturan turunan agar UU tersebut dapat dilaksanakan.

SIMPULAN

Pemerintah Daerah dalam mengatasi sampah di objek wisata Pantai Jakat dengan menerbitkan peraturan pengolahan sampah. Dimana untuk melaksanakan peraturan tersebut di lakukan dengan penertiban pada wisatawan untuk mekanisme pengelolaan pembuangan sampah.

Dimana dari diterbitkan dan dilakukan penertiban pengelolaan sampah maka sampah dapat dilasifikasikan sesuai jenisnya dan ada sampah yang jenisnya dapat dilakukan daur ulang sehingga sampah yang dapat dikelola lagi menjadi barang yang berguna.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. (2022a). Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah. Retrieved from Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan website: <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/>

2023. *JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari* 4(2):46-52
- Anonim. (2022b). Ditjen PSLB3 KLHK Didesak Miliki Langkah Terukur Tangani Sampah. Retrieved from <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/40924/t/Ditjen>
- Ansyori, S. (2014). Kurang Perhatian, Pantai Jakat Bengkulu Dipenuhi Sampah. *Medcom.Id*, p.1. Retrieved from <https://www.medcom.id/nasional/daerah/IKY7M0Ab-kurang-perhatian-pantai-jakat-bengkulu-dipenuhi-sampah>
- Anuardo, R. G., Espuny, M., Carolina, A., & Costa, F. (2022). Toward a cleaner and more sustainable world: A framework to develop and improve waste management through organizations, governments, and academia. *Heliyon*, 8(November 2021). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e09225>
- Carmela, M., Brunetta, F., Bimbo, F., & Kostoula, M. (2021). Digitalization within food supply chains to prevent food waste. Drivers, barriers and collaboration practices. *Industrial Marketing Management*, 93(January), 208–220. <https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2021.01.005>
- Darmi, T., Mujtahid, I. M., & Rosidin. (2021). Stakeholders Collaboration Coastal Communities in Empowering. *E3S Web of Conferences*, 01008. <https://doi.org/https://doi.org/10.1051/e3sconf/202131701008>
- Dayana, M. (2021). Kolaborasi Stakeholders dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. *Jiana: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 19(2), 12–23.
- Gunanti, A. A. I. P., Permana, G. P. L., & Gama, A. W. O. (2021). Kolaborasi antara bank sampah dan masyarakat desa kedewatan dalam pengelolaan sampah rumah tangga bernilai ekonomis. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 04(18), 188–195.
- Hasibuan, R. (2016). Analisis Dampak Limbah/Sampah Rumah Tangga Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup. *Advokasi*, 04(01), 42–52.
- Hupponen, M., Havukainen, J., & Horttanainen, M. (2023). Long-term evolution of the climate change impacts of solid household waste management in Lappeenranta, Finland. *Waste Management*, 157(December 2022), 69–81. <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2022.11.038>
- İncekara, M. (2022). Determinants of process reengineering and waste management as resource efficiency practices and their impact on production cost performance of Small and Medium Enterprises in the manufacturing sector. *Journal of Cleaner Production*, 356(131712).
- Jäger, J. K., & Piscicelli, L. (2021). *Collaborations for circular food packaging: The set-up and partner selection process*. 26, 733–740. <https://doi.org/10.1016/j.spc.2020.12.025>
- López, I., Gutiérrez, V., Collantes, F., Gil, D., Revilla, R., & Luis, J. (2018). Developing an indicators plan and software for evaluating Street Cleanliness and Waste Collection Services. *Journal of Urban Management*, 6(2), 66–79. <https://doi.org/10.1016/j.jum.2017.06.002>
- Mahyudin, R. P. (2017). Kajian Permasalahan Pengelolaan Sampah dan Dampak Lingkungan di Tpa (Tempat Pemrosesan Akhir). *Jukung Jurnal Teknik Lingkungan*, 3(1), 66–74.
- Mcafee, D., Reinhold, S., Alleway, H. K., & Connell, S. D. (2021). Environmental solutions fast-tracked: Reversing public scepticism to public engagement. *Biological Conservation*, 253(October 2020), 108899. <https://doi.org/10.1016/j.biocon.2020.108899>
- Ming, F., Bui, T., Tseng, M., Lim, M. K., & Tan, R. R. (2020). Sustainable solid waste management in coastal and marine tourism cities in Vietnam: A hierarchical-level approach. *Resources, Conservation & Recycling*, (October), 105266. <https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2020.105266>

2023. *JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari* 4(2):46-52
- Morse, R. S., & Stephens, J. B. (2012). Teaching Collaborative Governance: Phases, Competencies, and Case-Based Learning. *Journal of Public Affairs Education*, 18(3), 565–583. <https://doi.org/10.2307/23272656>
- Muhyi, H. A., & Chan, A. (2017). The Penta Helix Collaboration Model in Developing Centers of Flagship Industry in Bandung City. *Review of Integrative Business and Economics Research*, 6(1), 412–417. Retrieved from https://sibresearch.org/uploads/3/4/0/9/34097180/riber_th16-131_412-417.pdf
- Pranoto, Y. (2021). *Pantai Jakat Bengkulu Tercemar Sampah Rumah Tangga*. p. 1. Retrieved from <https://www.inews.id/multimedia/photo/pantai-jakat-bengkulu-tercemar-sampah-rumah-tangga>
- Rosyadi, S., Kusuma, A. S., Fitrah, E., Haryanto, A., & Adawiyah, W. (2020). The Multi-Stakeholder 's Role in an Integrated Mentoring Model for SMEs in the Creative Economy Sector. *SAGE Open*, October-De, 1–14. <https://doi.org/10.1177/2158244020963604>
- Van Hoof, B., & Thiell, M. (2014). Collaboration capacity for sustainable supply chain management: Small and medium-sized enterprises in Mexico. *Journal of Cleaner Production*, 67, 239–248. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2013.12.030>
- Yuniningsi, T., Darmi, T., & Sulandari, S. (2019). Model Pentahelik Dalam Pengembangan Pariwisata di Kota Semarang. *Journal of Public Sector Innovation*, 3(2), 84–93.